

# Islam, Muhammadiyah dan Advokasi Kemiskinan

Oleh: Zuly Qodir\*

## Abstract

*The poverty data of Indonesian that shown by World Bank November 2006 tend to increase. The problem of poverty denotes reality and fact in Indonesia. The majority of Indonesian constitutes Moslem. According to social researcher there are several impact of the proverty toward religion fundamentalism and religion conversion. In this sense, Muhammadiyah movement in Indonesia there is a popular terminology in term of this organization concerns regarding poverty solving, that is the al-ma'un theology. Ahmad Dahlan as a founder of the above organization derived the concept of al-ma'un including three activities: education, healthy and helping orphan. The main three programs have revealed that Muhammadiyah denotes religion social organization has involved in solving the poverty problem.*

Keywords: *al-ma'un, Islam, kemiskinan, dan teologi.*

## I. Pendahuluan

Kemiskinan yang melanda bangsa ini semakin mengerikan dan dahsyat. Berdasarkan data terakhir dari World Bank Nopember 2006 menyebutkan kemiskinan di Indonesia meningkat menjadi 49 % (149 juta jiwa) dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 200 juta jiwa.<sup>1</sup>

Masalah kemiskinan memang bukan suatu kondisi yang diinginkan oleh masyarakat, baik kota maupun desa. Tetapi senyatanya jeratan kemiskinan saat ini senantiasa mengintai sepanjang hari sehingga setiap tahun angka kemiskinan bukannya semakin berkurang, tetapi malah terus meningkat. Data berikut memberikan bukti demikian mengerikannya kemiskinan di negeri ini, tahun 2005 angka kemiskinan mencapai 35,10 juta (15,97 %, tetapi tahun 2006 meningkat menjadi 39,05 juta atau 17.75%.

Memang ada perbedaan data yang dikeluarkan antara Pemerintah Negeri ini dengan Wordl Bank, tetapi tidak akan didiskusikan mana data yang akurat dan validasinya. Yang menjadi keprihatinan adalah bahwa fakta kemiskinan tetap

---

\* Penulis adalah peneliti pada Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Univesitas Gadjah Mada Yogyakarta Email: zuly\_qodir@yahoo.com

<sup>1</sup> *Kompas*, 18 November 2006.

ada dan banyak di negeri ini.

Problem kemiskinan adalah problem riil masyarakat bangsa ini, yang mayoritas beragama Islam. Terkait dengan agama Islam khususnya, banyak pengamat dan peneliti sosial menyatakan bahwa jeratan kemiskinan akan membawa dampak pada adanya fundamentalisme agama, selain perpindahan agama demikian hadist Nabi menyatakan. Kemiskinan menyebabkan fundamentalisme agama karena orang Islam sebagai mayoritas akan memandang adanya proses politik dan kebijakan negara yang tidak adil atas umat Islam, sehingga mereka melakukan perlawanan (radikalisasi) atas kebijakan negara.

Kemiskinan adalah jeratan yang harus dibongkar oleh semua pihak tanpa pandang bulu, apalagi kaum beriman. Iman hanya akan bermanfaat pada orang lain tatkala mampu memancarkan kasih sayang dan dampak pada orang lain, seperti diketahui dalam banyak literatur Islam bahwa keimanan yang benar adalah yang berdampak pada orang lain. Seorang muslim belum sempurna imannya tatkala masih ada sebagian disekitar kita yang teraniaya karena tangan kita, dan miskin.

## **II. Globalisme Penyebab Pemiskinan**

Para penganjur globalisme ekonomi selama bertahun-tahun, sampai saat ini selalu menyatakan bahwa maksud dari globalisasi ekonomi adalah membantu kaum miskin di dunia. Mereka berpendapat, bahwa dengan menghilangkan sejumlah hambatan perdagangan bebas yang akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinational (perusahaan besar) dan berbagai investasi keuangan, maka itulah gagasan terbaik menuju pertumbuhan dan jalan terbaik dari kemiskinan.<sup>2</sup>

Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa berjuta-juta orang yang menentang globalisasi ekonomi akan merugikan kepentingan kaum miskin sendiri. Oleh sebab itu, setiap orang yang tidak setuju dipersilakan minggir dan menyerahkan persoalan hidupnya pada perusahaan-perusahaan besar, para bankir, birokrasi besar untuk merencanakan dan pemecahan masalah yang mengglobal. Para penganjur globalisme ekonomi kemudian melanjutkan dengan menyatakan, jika para penentang globalisme berhenti, sesungguhnya kelompok Bretton Woods (IMF, Bank Dunia dan WTO) ditambah Nike, dan Mosanto akan memberi berkah pada dunia, khususnya kaum miskin.

Banyak bukti menyebutkan bahwa globalisme ekonomi-perdagangan telah menyebabkan jurang yang semakin tajam antara orang kaya dengan orang miskin. UNDP melaporkan hal ini sejak tahun 1999, bahkan sejak diberlakukannya

---

<sup>2</sup> Mander, Jerry, Deby Barker dan David Corten (2003). *Globalisasi Membantu Orang Miskin? Globalisasi, Kemiskinan dan Ketimpangan*. (Yogyakarta: Cinderalas), hlm. 4-6.

perdagangan bebas dan sistem keuangan global jurang kemiskinan dan kaum kaya semakin tajam, namun tetap saja globalisme ekonomi mendapatkan tempat dihati banyak orang, termasuk di Indonesia. Bahkan, rezim politik Indonesia sekarang bisa dikatakan sebagai rezim politik yang paling “didikte oleh” globalisme ekonomi-perdagangan dan sistem keuangan global.

Bukti paling akhir adalah rencana akan dijadikannya Badan Hukum Pendidikan Swasta, setelah sebelumnya diluncurkannya dan diadopsinya Badan Hukum Milik Negara (BHMN) untuk perguruan tinggi negeri seperti UI, UGM, ITB, Unair, dan dengan konsekuensi dibukanya kelas-kelas internasional (Program Internasional) di beberapa perguruan tinggi, sebagai akibat dorongan perdagangan dan liberalisasi pendidikan. Bahkan, data terakhir, Agustus 2007 ini, Singapura telah siap untuk menerima lulusan sekolah-sekolah program Internasional di Indonesia sejumlah 5000 orang alumni untuk diperkerjakan di pelbagai perusahaan dan institusi di Singapura.

Akibat lain dari globalisme adalah swastanisasi BUMN, sehingga penjualan BUMN adalah bagian tak terpisahkan dari proyek globalisme ekonomi, yang merupakan konsekuensi dari adanya liberalisasi perdagangan, dan investasi, sehingga perusahaan-perusahaan multinasional dan bakir-bankir harus dibebaskan menanankan modalnya di Indoenesia, juga pengelolaan-pengelolaan harus diserahkan pada swasta, sebab swastanisasi adalah jalan terbaik untuk penyelamatan BUMN, Telkom, Pertamina, PJKA, PDAM adalah perusahaan-perusahaan milik pemerintah/negara yang kemudian menerima proyek globalisme ekonomi-perdagangan misi globalisasi.

Proyek globalisasi ekonomi-perdagangan yang terus digulirkan dengan struktur-struktur globalisasi seperti liberalisasi perdagangan (GATS), deregulasi, privatisasi, dan penyesuaian struktural global pemerintahan (good governance, Pilkada dan Pilpres Langsung), civil society, tranparansi, land reform, adalah alat-alat kaki tangan globalisme yang sesungguhnya telah menyebabkan banyak gelandangan di Indonesia, masyarakat menjadi tidak memiliki tanah untuk bercocok tanam/bertani, dan mereka hidup dalam gelimang kelaparan. Masyarakat tidak memiliki akses pada pelayanan publik yang pokok seperti biaya kesehatan yang mahal, perawatan medis, pendidikan mahal, sanitasi sebab ada hak guna air (UU Penggunaan Sumber Daya Air), penggunaan air bersih karena lebih banyak dipakai untuk keperluan Danone Group (Aqua, dan Unilever) yang menyebabkan banyak orang menjadi lebih buruk kehidupannya dan semkain sengsara, tetapi tetap saja mendapatkan pembenar di tingkat pembuat kebijakan bahkan belakangan ormas keislaman turut menjadi salah satu penyumbang proyek globalisasi-ekonomi-perdagangan yang melayangkan program Hak cipta (Property Rights) dan seterusnya.

Pertanyaan, mengapa tidak bisa keluar dari anjuran para pendukung setia globalisme ekonomi-perdagangan-struktur politik global. Hal ini disebabkan adanya khutbah kaum pendukung globalisme yang sangat masyhur pada dunia

ketiga (seperti Indonesia) yang kemudian masuk pada pembuat-penyusun kebijakan ekonomi, pendidikan, politik, kesehatan, pertanian, pertanahan, pertanian nasional. Para pembuat kebijakan ditingkat nasional ini yang selalu mendasarkan dirinya pada prinsip-prinsip globalisasi ekonomi-perdagangan dan politik internasional, sehingga tampak dari jauh kebijakan negara yang dibuat adalah pro rakyat kebanyakan (rakyat miskin) sekalipun sejatinya semakin memiskinkan dan hebatnya didukung oleh ormas keagamaan.

### III. Lima Khutbah Pendukung Pemiskinan Rakyat

Ada lima dalil kutbah utama para penganjur globalisme di dunia. Dalil pertama adalah: liberalisasi dan integrasi pasar; kedua, globalisme suatu yang tidak tertotak dan terbantahkan (terbalikkan-mundur kembali); ketiga, globalisasi tidak akan terkendalikan dan terkontrol oleh siapaun; keempat, globalisasi akan menguntungkan semua orang; dan kelima, globalisasi akan membawa iklim demokrasi ke seluruh dunia.

Kita lihat secara ringkas dalil-dalil dari lima klaim globalisasi yang mendasari neo-liberalisme dunia saat ini sehingga kita butuh sebuah perspektif dan sebuah gerakan yang efektif jika hendak menghadapi globalisasi dan neo-liberalisme yang sejatinya sangat mengerikan kehidupan banyak orang dan menguntungkan sedikit saja.

**Pertama;** liberalisasi dan integrasi pasar. Cita-cita utama pasar bebas yang akan bekerja secara otomatis (selektif regulating) adalah bagian yang secara normative menjadi dasar dari globalisasi. Fungsi utama pasar bebas (yang didalamnya membayangkan adanya efisiensi, rasionalitas dan kemakmuran serta kemajuan untuk meningkatkan integrasi social dan kemakmuran-kemajuan material) hanya dapat diwujudkan dalam masyarakat demokratis yang menghargai dan melindungi kebebasan individu. Para penganjur neoliberalisme dan globalisasi menuntut adanya “liberalisasi pasar” yakni deregulasi perekonomian nasional. Dikatakannya, pandangan semacam itu tidak hanya akan memunculkan pasar global yang teintegrasi, namun sekaligus akan melahirkan kebebasan politik yang lebih besar bagi semua warga dunia. Tatanan ekonomi yang memberikan kebebasan ekonomi secara langsung yakni kapitalisme kompetitif, juga akan mendorong kebebasan politik sebab ia akan memisahkan kekuatan ekonomi dan kekuasaan politik sehingga memungkinkan terjadinya keseimbangan antara keduanya”.<sup>3</sup>

Dengan pandangan seperti itu, masyarakat oleh penganjur globalisasi dan neoliberalisme harus bersikap menerimanya. Kita lihat anjuran mereka:

“Gagasan pendorong dibalik globalisasi adalah kapitalisme pasar bebas,

---

<sup>3</sup> Steger, Manfred B. (2006). *Globalisme: Bangkitnya Ideologi Pasar*. (Yogyakarta: Lafadl), hlm. 81.

semakin Anda biarkan kekuatan pasar untuk berkuasa dan semakin Anda membuka perekonomian Anda pada kompetisi dan perdagangan bebas, maka akan semakin efisien ekonomi Anda. Globalisasi berarti penyebaran kapitalisme pasar bebas ke semua Negara di dunia. Karena itu, globalisasi juga memiliki perangkat saluran ekonominya sendiri, aturan-aturan seputar pembukaan, deregulasi, dan privatisasi perekonomian, untuk menjadikannya lebih kompetitif dan menarik bagi investor asing”.<sup>4</sup>

Dengan segala instrument yang dimainkan, melalui hardware dan software pasar bebas, maka tidak akan lagi globalisasi yang saling berkelindan dengan neoliberalisme ekonomi dan politik akan memenangi sejarah manusia dalam era yang disebut kapitalisme pasar bebas. Globalisasi akan menciptakan pasar bebas yang tunggal. Pakaian ekonomi-politik akan menentukan dalam era globalisasi. Itulah kutbah yang sangat membius sebagian pemimpin Negara-negara penghutang seperti Indonesia, yang pemimpinnya tidak memiliki ketegasan sikap atas Utang Luar Negeri dan penjajahan pasar global.

**Kedua**, globalisme sesuatu yang tidak akan tertolak dan mundur kembali. Menurut para penganjur globalisasi dan liberalisme ekonomi, globalisasi merupakan refleksi atas penyebaran kekuatan pasar yang tidak bisa dibendung yang dikendalikan oleh inovasi teknologi yang menjadikan integrasi pasar perekonomian nasional menjadi tak terbungung. Globalisasi selalu terkait dengan kekuatan atas kepercayaan pada kemampuan pasar dalam memanfaatkan teknologi baru untuk menyelesaikan persoalan social secara lebih baik dibandingkan sumber-sumber alternative lainnya. Pemerintah, partai politik, dan gerakan social tidak punya pilihan lain kecuali ”menyesuaikan” dengan ketakterelakkan globalisasi.<sup>5</sup>

Kita lihat betapa kuatnya desakan para pendukung globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia. Pernyataan mantan Presiden AS, Bill Clinton misalnya:

”Saat ini kita harus menerima logika tak terelakkan globalisasi. Bahwa segala hal, dari kekuatan perekonomian kita sampai keamanan kota-kota kita, hingga kesehatan rakyat kita, tidak hanya tergantung pada peristiwa-peristiwa di negeri kita, tetapi juga peristiwa yang terjadi jauh di belahan dunia lain. Globalisasi adalah sesuatu yang tidak bisa dibendung. Proteksionisme hanya akan membuat segala sesuatu kian memburuk. Globalisasi adalah elemen kehidupan kita yang tidak bisa dielakkan. Tidak seperti kita mencegah ombak membentur pantai. Globalisasi tidak lagi bisa dihentikan. Argument yang mendukung liberalisasi perdagangan dan pasar terbuka sangat kuat dan dibuat oleh banyak orang diantara kita, dan kita tidak boleh takut untuk berhadapan dengan mereka yang tidak sependapat”.<sup>6</sup>

Elit-elit pendukung neoliberal di Negara-negara Barat dan non Barat

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 84.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 91.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 92.

terus menggemakan slogan kelompok globalis, dengan menyatakan bahwa Negara manapun membutuhkan apa yang dinamakan liberalisasi dan deregulasi perekonomian. Mereka akan selalu menyatakan tidak ada pilihan lain dengan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia. Dari India, Pilipina san seterusnya selalu berkeyakinan demikian atas globalisasi.

Keyakinan seperti itu membuat para pendukung globalisme mudah mendapatkan pembenar di tanah air masing-masing dan neara-negara yang sebelumnya tidak mendukung bahkan terdapat potensi pembangkangan. Untuk melancarkan kampanye tentang globalisasi, kelompok pendukung globalisasi mengkampanyekan wacana yang bersifat menetralsir penentangan anti globalisasi dengan mendepolitisasi wacana globalisasi. Pernyataan yang paling populer: bahwa kebijakan neoliberal adalah kebijakan yang melampaui politik, sebab ia hanya menjalankanapa yang ditakdirkan oleh alam.<sup>7</sup>

Kita lihat pernyataan paling sensational para pendukung globalisasi Thomas Friedman, seperti berikut dibawah ini:

”Dan itulah sebabnya kenapa Amerika bukanlah sekedar sebuah Negara. Ia adalah nilai spiritual dan model... Dan itulah alasan kenapa saya teramat sangat percaya bahwa agar globalisasi bisa berlangsung, Amerika harus tetap menjadi yang terbaik, hari ini, esok, dan sepanjang masa. Ia tidak hanya bisa, tetapi harus menjadi inspirasi bagi seluruh dunia”<sup>8</sup>

Argumen-argumen diatas dengan jelas memberikan petunjuk bahwa globalisasi dan liberalisasi ekonomi dibawah payung globalisme dan neoliberalisme merupakan suatu yang sedang dikampanyekan secara massif oleh para pendukung globalisme di dunia agar Negara-negara lainnya, yang walnya menolak sekalipun terus mendukung sebab hanya mendukunglah yang dianggap memberikan keuntungan.

**Ketiga**, globalisasi tidak akan terkontrol dan terkendalikan sercara perseorangan. Para pendukung globalisasi akan memberikan pandangan yang sangat jelas tentang sikapnya pada globalisasi. Misalnya, Robert Hormats, Pimpinan Goldman Sach International, berpendapat: ”Keindahan luar biasa dari globalisasi adalah bahwa ia tidak terkendalikan oleh perseorangan, pemerintah atau lembaga manapun”. Bahkan, Thomas Friedman, seorang globalis murni lainnya menyatakan dengan sinis tatkala Mahathir Mohammad menyatakan akan melawan globalisasi yang membuat krisis keiangan di Asia, termasuk Malaysia, Indonesia dan Thaliand. Demikian kata Friemdan:

”Ah, mohon maaf, Mahathir, tapi di planet mana Anda tinggal? Anda bicara tentang partisipasi dalam globalisasi seolah pilihan yang Anda miliki. Globalisasi bukanlah pilihan. Ia adalah kenyataan ... dan landasan utama globalisasi adalah tak seorang pun memegang kendali ... kita semua ingin mempercayai bahwa

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 94.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 98.

seseorang memegang kendali dan bertanggung jawab (atas globalisasi). Namun ruang pasar global saat ini adalah group elektronik yang acapkali dibentuk oleh para pedagang valuta, obligasi, maupun saham yang anonym serta investor multinasional, yang dihubungkan melalui layer (computer) dan jaringan”.<sup>9</sup>

Dengan menggunakan dukungan Negara-negara kuat dibelahan Utara, lembaga-lembaga internasional semacam IMF, WTO dan Bank Dunia para pengusung globalisme mendulang keuntungan yang maha dahsyat. Kebijakan dikeluarkan oleh mereka yang sering kita kenal dengan sebutan ”Konsensus Washington” sejak tahun 1970-an hingga sekarang. Ada sekurang-kurangnya sepuluh prinsip ”Konsensus Washington” yang harus dijalankan oleh Negara-negara pengutang di dunia:

- Menjamin disiplin fiscal, dan mengendalikan deficit anggaran.
- Mengurangi pengeluaran public, khususnya militer dan administrasi public
- Reformasi pajak, dengan basis yang efektif dan lebih luas
- Liberalisasi keuangan, dengan tingkat bunga yang ditentukan pasar
- Nilai tukar mata uang kompetitif, untuk membantu ekspor
- Liberalisasi perdagangan, disertai dengan penghapusan ijin impor dan pengurangan tariff
- Mendorong investasi asing langsung
- Pivatisasi BUMN, demi manajemen yang efisien dan kinerja yang lebih baik
- Deregulasi ekonomi
- Perlindungan atas hak cipta (property rights)

Dengan argument bahwa tidak ada pemimpin yang mampu mengendalikan globalisasi, sebenarnya bisa dikatakan AS ingin menempatkan diri sebagai satu-satunya pemimpin dunia yang hendak memperluas hegemoninya. AS dengan keangkuhannya hendak menjadi polisi dunia dan penguasa tatanan ekonomi-politik dunia tanpa pesaing sama sekali, sehingga apa yang dikampanyekan dengan lancer diterima belahan dunia lainnya.

**Keempat**, globalisasi akan menguntungkan semua orang. Dalil ini memberikan gambar pada kita betapa semua orang agar mengafirmasi atas kampanye dahsyat globalisasi yang dibawa AS dan teman-temannya ke dunia lainnya. Kita simak pertemuan Negara-negara maju di Lyon Perancis, tahun 1996 yang merupakan kampanye Negara-negara penyokong globalisasi. Demikian pernyataan bersama ketika itu:

”Pertumbuhan dan kemajuan ekonomi dunia yang interdependen dewasa ini berkaitan erat dengan proses globalisasi. Globalisasi memberikan peluang yang sangat besar bagi masyarakat di masa depan, tidak hanya bagi Negara kita,

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 102.

tetapi juga Negara lain. Aspek-aspek positifnya meliputi ekspansi intervensi dan perdagangan yang belum pernah terjadi sebelumnya: pembukaan perdagangan internasional di wilayah paling padat dan berbagai peluang bagi banyak negara berkembang untuk memperbaiki standart hidupnya; penyebaran informasi yang kian cepat, inovasi teknologi, dan menjamurnya lapangan pekerjaan dengan tenaga yang terlatih. Karakter globalisasi ini telah melahirkan perluasan kekayaan dan kemakmuran luar biasa di dunia. Karena itu, kami yakin bahwa proses globalisasi adalah sumber harapan bagi masa depan”.<sup>10</sup>

Kita kutipkan kembali pendapat pendukung globalisasi, George David, CEO United Technology, dengan menyatakan kita perlu menjamin berlanjutnya keberhasilan agenda global ini. Demikian pernyataan David:

”Kita tengah berada pada masa paling optimistik: batas-batas antar bangsa telah menyusut, liberalisme ekonomi sedang diberlakukan dan terbukti masuk akal, perdagangan dan investasi merebak, kesejangan penempatan antar bangsa menyempit, dan generasi yang makmur secara global tercatat pada tingkatan yang tinggi, dan saya percaya hal ini akan berlangsung terus”.<sup>11</sup>

Itulah dalil keempat yang dirintis dan dikampanyekan kaum globalis agar dunia mengikutinya. Namun tidak satupun yang memberikan argument siapa yang membuktikan jika ”janji-janji” globalisasi itu terbukti untuk masyarakat luas, dimanakah sisi masuk akal nya dari globalisasi ekonomi dan politik.

**Kelima**, globalisasi akan membawa iklim demokrasi keseluruh dunia. Ini dalil kelima yang menjadikan dunia semakin hiruk pikuk dengan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dibawah komando Amerika. Klaim kaum globalis atas globalisasi dan neoliberalisme adalah bahwa pasar bebas dan demokrasi adalah istilah yang sinonim. Francis Fukuyama, seorang penasehat Kepresidenan AS menyatakan adanya korelasi positif antara perkembangan ekonomi suatu Negara dengan demokrasi. Semakin makmur sebuah Negara maka semakin demokratislah Negara tersebut. Fukuyama melanjutkan kutbahnya dengan mengatakan:

”Tingkat perkembangan ekonomi yang dihasilkan globalisasi sangat kondusif bagi terciptanya masyarakat sipil dan kelas menengah yang kuat. Kelas menengah yang kuat dan struktur masyarakat inilah yang akan mendorong demokrasi”.<sup>12</sup>

Untuk meyakinkan Negara-negara lainnya, AS melalui Direktur Jendral WTO, Mikie Moore menyatakan bahwa organisasinya adalah organisasi yang mendorong terjadinya proses demokrasi fundamental sebab di dalamnya terjadi consensus yang merepresentasikan demokrasi dengan cara mengungkapkan opini mereka secara bebas mengenai segala persoalan perdagangan internasional. Namun yang harus diingat adalah bahwa consensus dalam WTO senantiasa

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 110.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 111.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 122.

dikendalikan oleh Negara-negara kuat seperti AS, Jepang, Uni Eropa, dan Kanada. Keputusan diambil secara informal melalui kaukus oligarkis bentukan-bentukan perusahaan dagang raksasa yang ada dalam koridor organisasi dagang dunia dalam negosiasi-negosiasi "rahasia" selama pertemuan tingkat menteri WTO. Termasuk pertemuan Singapura tahun 1999 dan 2004 yang lalu.

Melihat apa yang dilontarkan pada pendukung globalisme ekonomi-perdagangan yang berlandaskan pada perdagangan bebas, privatisasi, keuangan global, system politik internasional, yang sejatinya adalah global kapitalisme membuat warga Negara menghadapi tantangan yang sangat serius, karena itu tidak bisa semabangan dalam meresponnya sehingga jeratan kemiskinan tidak semakin merajalela.

Membongkar jeratan kemiskinan harus dilakukan dengan cara-cara yang sistematis, dari mewacanakan agar masyarakat muslim memiliki kepekaan sosial yang tinggi sehingga sikap solidaritas dan filantropi menjadi bagian hidupnya, selain cara-cara yang konkret, seperti menyantuni mereka yang miskin, seperti pemberian yang bersifat karitatif, sekalipun banyak dikritik.

Mengingat kemiskinan merupakan lingkaran setan yang mengerikan, sehingga kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya dengan pemberian yang karitatif, tetapi sistematis maka harus pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus dan dikerjakan oleh kelompok masyarakat yang bersentuhan dengan penanaman jiwa agama (Islam) pada masyarakat. Mereka itulah para mubaligh, para aktivis Islam yang bergerak dalam level wacana agar mampu mempengaruhi kebijakan negara.

#### **IV. Teologi al-Maun: Peran Muhammadiyah**

Dengan melihat lingkaran kemiskinan yang hebat itulah, maka umat Islam tidak boleh tinggal diam dan berpangku tangan untuk turut meresponnya, disitulah posisi mubaligh dan aktivis penting.

Apa yang dilakukan Muhammadiyah pada masa Syaafi Maarif untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi dengan bersama-sama membentuk koalisi antar agama untuk anti korupsi merupakan langkah awal yang baik dalam upaya merumuskan bentuk teologi yang berpijak pada kenyataan-realitas masyarakat Indonesia, seperti juga dilakukan Ahmad Dahlan dahulu yang menafsirkan Al-Maun dengan tiga kegiatan utama: pendidikan, kesehatan dan penyantunan orang miskin (membuat panti anak yatim-piatu) tatkala mendirikan Muhammadiyah. Dengan kata lain, melakukan transformasi pemahaman keagamaan dari sekadar *doktrin-doktrin sacral* dan "*kurang berbunyi*" secara sosial menjadi *kerjasama atau koperasi untuk pembebasan manusia*. Walaupun banyak kalangan melihat apa yang dilakukan Muhammadiyah tersebut masih sebatas transformasi pada tingkatan *elite* dan belum menyentuh *grass root*. Dalam konteks inilah teologi kerja Islam doktrin suci yang melampaui *absolutisme teologis yang*

*lebih bercorak standar ganda dan kurang respek dengan masalah kemiskinan menjadi teologi kerjasama atau (ta'awun `ala al-birri wa at-taqwa).*

Dengan kata lain, rumusan teologi Islam tidak sebatas memperkuat dimensi kesalehan individual sebagai bentuk *personal piety*, melainkan juga digerakkan menjadi teologi kerja yang mencerminkan sebuah konstruksi teologi Islam yang berpihak pada kaum mustadafin, dan berperspektif *social piety*. Adapun indikasi keberhasilan yang diharapkan dari pengembangan teologi kerja yang melampaui klaim *absolutistas* dalam arti *menjembati pemaknaan teologi Islam pada masalah-masalah riil kemanusiaan seperti kemiskinan* adalah bagaimana umat Islam di Indonesia bisa hidup bersama dalam perbedaan dan keragaman, bisa bekerjasama dalam mengatasi kemiskinan sebagai wujud kesalehan kaum beriman yang diisyaratkan oleh Teologi Kerja kaum muslim. Indikasi yang bisa dijelaskan adalah bahwa Umat Islam dalam kehidupan sehari-hari seharusnya memiliki kepekaan atas masalah-masalah riil yang dihadapi, seperti kemiskinan yang menimpa masyarakat bawah baik pedesaan maupun perkotaan, bisa membangun komunikasi dan hubungan antarumat beragama untuk bersama-sama menjadikan kemiskinan sebagai bentuk musuh bersama, baik kalangan mubaligh, ustadz, maupun aktivis muslim. Kaum muslim tidak disibukkan dengan saling memutlakkan kebenaran agamanya, tetapi bisa saling menghormati keyakinan orang lain, bisa saling berdialog dengan orang beragama lain, bisa saling bekerjasama dengan umat beragama lain dalam persoalan-persoalan yang menjadi kebutuhan dan kepentingan bersama (demokratisasi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, pengembangan pendidikan, bahkan penanganan bencana dan kemiskinan).

Tafsir atas kaum mustadafin karena itu harus mendapatkan tempat yang lebih proporsional, bahkan penafsiran atas kaum mustadfin hendaknya mendasarkan pada perspektif teologi yang lebih pro kaum miskin, kaum tertindas, hina, dina dan lemah. Inilah sebetulnya perspektif teologi al-maun harus mendapatkan tempat dalam langkah dan gerakan Muhammadiyah. Sebagai ormas yang besar dan independen, Muhammadiyah jangan terjebak dalam pertarungan rutinitas aktivisme organisasi yang memang acapkali menyita banyak waktu dan perhatian, tetapi kurang produktif dan responsif terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang terus berkembang secara massif dalam masyarakat.

Muhammadiyah, dengan begitu sudah seharusnya memiliki rencana yang sangat fundamental, merombak struktur teologi yang bersifat eksklusif-sunni, menjadi paradigma dan struktur teologi transformatif, yang lebih mirip dengan paradigma teologi pembebasan tahap kedua dan ketiga, yakni bukan hanya tahapan penyebaran gagasan pembebasan, atau tahap perancangan tafsir teologi, tetapi mulai masuk pada menyusun isu-isu strategis dan berdampak luas pada masyarakat lalu merencanakan tindakan aksi untuk mengatasinya. Dengan demikian, Muhammadiyah tidak hanya berhenti pada level gagasan teologi al-maun, tetapi praksis teologi al-maun menjadi pijakan seluruh gerakan

Muhammadiyah saat ini dan mendatang.

Muhammadiyah mestinya bersuara atas nasib saudara-saudara kita yang ada di Porong, Sidoarjo, Jatim atas korban Lapindo yang mereka alami, Muhammadiyah juga mestinya bersuara keras atas terjadinya korban TKW-TKW yang ada di Malaysia, Singapura, dan Timur Tengah, dan juga Muhammadiyah seharusnya bersuara keras atas terjadinya praktek-praktek pembalakan hutan dan pencurian-pencurian uang negara (korupsi) sebab mereka adalah bagian dari anak bangsa ini yang harus diberi pelajaran serius karena telah mengorban banyak manusia dan negara. Tetapi, sejauh yang saya tahu, Muhammadiyah belum secara eksplisit memberikan “suara kerasnya” atas penderitaan mereka yang dianiaya oleh mereka yang berkuasa dan memiliki koneksi, keuangan dan seakan-akan kebal hukum.

Jika sudah seperti itu, sesungguhnya Muhammadiyah belum terlihat jelas bedanya dengan ormas-ormas lainnya, yang masih menunggu untuk kemudian bersuara, bahkan dalam konteks lumpur Lapindo, NU Jatim lebih dahulu memberikan sikap kerasnya atas lambannya negara merespons penderitaan masyarakat Porong dan sekitarnya. Mungkin karena NU Jatim merasa lebih dekat secara emosional dengan masyarakat Porong, tetapi bagaimana pun Muhammadiyah juga bukan ormas yang seharusnya merasa jauh dengan masyarakat Porong, yang penduduknya mayoritas berafiliasi ormasnya adalah NU. Disinilah pentingnya pembongkaran sekat teologi yang eksklusif-menjadi teologi inklusif-transformatif, sehingga memihak masyarakat tidak didasarkan karena dia NU, Muhammadiyah, Persis, SI atau yang lainnya, tetapi didasarkan karena masyarakat membutuhkan pemihakan dan pembelaan. Masyarakat sebagai warga masyarakat yang membutuhkan sentuhan kemanusiaan dari orang beriman, bukan masyarakat yang hanya akan dieksploitasi oleh ormas agama, partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan aparat kemananan.

Jika Muhammadiyah secara tegas mulai merencanakan tindakan-tindakan advokatif atas masalah-masalah yang didata secara proporsional, terutama atas masyarakat yang mengalami penindasan dan pemiskinan, maka Muhammadiyah tidak akan terlalu banyak disibukkan dengan rutinitas organisasi yang memang membosankan dan melelahkan. Muhammadiyah akan lebih tampak progresif dan responsif sehingga perlahan-lahan akan dapat dilihat bahwa Muhammadiyah memang mengamalkan secara sungguh-sungguh teologi al-maun yang dahulu dikerjakan oleh Kiai Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, yang senantiasa menyapa kaum miskin dengan tindakan nyata.

Muhammadiyah sangat strategis dalam arti bahwa organisasi ini memiliki basis massa yang menyebar dari tingkat Wilayah sampai Desa (PWM-PRM) yang secara khusus sebetulnya dapat digerakkan untuk melakukan perlawanan kepada negara yang mendukung terjadinya proses sistematis pemiskinan rakyat. Apa yang dikutbahkan para pendukung globalisme ekonomi-perdagangan melalui para pembisik kebijakan negara di Indonesia, sesungguhnya dapat dihadapi

oleh ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU sebagai ormas besar yang sejak awal diharapkan menjadi basis civil Islam di Indonesia.

Namun, Muhammadiyah akan mengalami mati suri dari tingkat Wilayah sampai Ranting tatkala secara perlahan-lahan struktur organisasi dan aktivitas organisasinya juga sudah ditenderkan kepada lembaga-lembaga pemiskinan internasional dengan pelbagai macam atribut (kedok) yang disandangkan di belakangnya demi kesejahteraan rakyat dan negara sehingga perlu digagas apa yang disebut dengan welfare state, sosial-demokrasi ekonomi dan pemerintahan yang baik (good governance) yang merupakan bagian dari kampanye sistem pemerintahan global para pemberi utang luar negeri dari negara-negara kaya dan jauh lebih makmur dari negara-negara dunia ketiga (selatan) yang miskin.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hirts, Paul dan Grahame Thompson (2001). *Globalisasi Adalah Mitos*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mander, Jerry, Deby Barker dan David Corten (2003). *Globalisasi Membantu Orang Miskin?, Globalisasi, Kemiskinan dan Ketimpangan*. Yogyakarta: Cinderalas.
- Soros, George (2007). *Open Society: Reforming Global Capitalism*. Indonesia: Yayasan Obor.
- Steger, Manfred B (2004). *Globalisme: Bangkitnya Ideologi Pasar*. Yogyakarta: Lafadl.